

Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 – 2019

(Studi Kasus di desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)

Muhammad Nur faizun

Muhamfaizun15@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Semarang**

Abstrak

Pemerintah Desa sebagai pemerintahan terkecil `mengurusi banyak hal yang meliputi urusan administrative dan lain sebagainya yang memerlukan dukungan sumber daya manusia (SDM), dana/anggaran maupun sarana prasarana penunjang tercapainya berbagai urusan yang diemban desa. Desa Waturoyo memiliki banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan, n Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi dan Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. kinerja Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam Pengelolaan Dana Desa akan diuraikan dan dianalisa oleh peneliti dalam 6 tahapan Pengelolaan Dana Desa yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usaha, dan Pertanggungjawaban. Maka dari itu Pemerintah daerah supaya bisa menerbitkan regulasi yang didalamnya mengatur tenatng kompetensi yang harus di miliki oleh Kepala Deas sebelum mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tujuannya supaya dapat meminimalisir Kepala Desa yang kurang berkompeten dalam menajalakan tugasnya sebagai kepala desa.

Kata Kunci: Kepemimpinan,Pengelolaan,Dana Desa

Leadership of the Village Head in managing village funds for the 2018 – 2019 fiscal year

(Case Study in Waturoyo Village, Margoyoso District, Pati Regency)

Muhammad Nur faizun

Muhamfaizun15@gmail.com

**Department of Politics and Government, Faculty of Social and
Political Sciences, Diponegoro University, Semarang**

Abstract

The Village Government as the smallest government takes care of many things which include administrative matters and so on that require the support of human resources (HR), funds/budgets as well as supporting infrastructure facilities to achieve this. village affairs. Waturoyo Village has a lot of potential that can be explored and developed, n Management is an act of organizing the existing resources within the organization with the aim that these resources can be useful for the benefit of the organization and A leader is someone who has leadership skills, has the ability to influence the establishment /opinion of a person or group of people without asking the reasons. The leadership performance of the Waturoyo Village Head in Village Fund Management will be described and analyzed by researchers in 6 stages of Village Fund Management, namely Planning, Budgeting, Implementation, Administration, and Accountability. Therefore, the local government should be able to issue regulations in which it regulates the competencies that the Village Head must have before running for the Village Head, the aim is to minimize the Village Head who is less competent in carrying out his duties as village head.

Keywords: Leadership, Management, Village Fund

A. Pendahuluan

Pemerintah Desa sebagai wadah Pemerintahan yang paling kecil mengurus banyak hal yang meliputi urusan administrative dan lain sebagainya yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), dana / anggaran maupun sarana prasarana penunjang tercapainya berbagai urusan yang diemban desa. Dalam menunjang urusan desa, Pemerintah Pusat merumuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kepastian hukum atau jaminan kepada setiap Desa yang menerima dana pemerintah melalui anggaran nasional dan lokal melalui penyaluran dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa adalah suatu penunjang pelaksanaan tugas internal dan kegiatan pemerintahan Desa. Untuk mengatur pengelolaan Dana Desa, Pemerintah menerbitkan regulasi PP No.22 Tahun 2015. Pedoman mengenai pengelolaan keuangan desa (dana desa) diatur oleh bupati/walikota dengan memperhatikan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi yang diterbitkan oleh Bupati dibuat sebagai bentuk upaya *controlling* Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa. Kabupaten Pati, pengelolaan Dana Desa didasari pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Dalam penyalurannya, Dana Desa dibagi ke dalam tiga tahapan:

1. Tahap I : 20% Bulan January sampai dengan paling lambat Bulan Juni.
2. Tahap II : 40% bulan Maret sampai dengan paling lambat bulan Juni.

3. Tahap III : 40% pada bulan Juli sampai paling lambat bulan Oktober.

Dalam PerBup Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pemerintah melakukan *controlling* dan pengawasan alur dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan dana desa maka dari itu Kepala Desa bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa berdasarkan prosedur yang disetujui oleh Pemerintah Pusat, yakni :

1. Perencanaan
 - a) Memberikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perencanaan
 - b) Memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi
 - c) Memberikan kepastian waktu kepada masyarakat
 - d) Perencanaan sesuai dengan tujuan dari awal.
2. Penganggaran
 - a) Memberikan informasi transparansi anggaran terkait dana desa
3. Pelaksanaan
 - a) Memberikan informasi transparansi dana kepada masyarakat
 - b) Tepat dan bersih dalam memberikan alokasi sumber anggaran
 - c) Sesuai dengan APBDes yang sudah ditentukan
4. Penatausahaan
 - a) Memberikan informasi masyarakat tentang penjabaran keuangan 1 tahun anggaran
 - b) Memberikan informasi transparansi kepada masyarakat sesuai dengan program terkait dana desa

5. Pelaporan

- a) Memberikan hasil penggunaan keuangan desa sesuai dengan APBDes yang di tentukan

6. Pertanggung jawaban

- a) Keseluruhan rencana yang akan direalisasikan sesuai dengan target dalam pertanggung jawaban oleh Kepala Desa.

Di sisi lain, selama periode kepemimpinan Kepala desa Sis Susilo, Desa Waturoyo juga mengalami perkembangan yang cukup baik. Dalam penilaian Status Desa Membangun, Desa waturoyo mengalami kenaikan status, dari awalnya Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang pada tahun 2019 dan dapat menjadi Desa maju apabila dapat mengoptimalkan potensi dari desa. Namun, itu dirasa belum cukup. karena sebagian masyarakat masih menganggap kepemimpinan Kepala Desa Sis Susilo menanggapi respon terhadap aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Didasari dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau lebih jauh bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yang terkait dengan dana desa di desa waturoyo dengan tahun anggaran 2018 – 2019 serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang di Kelola oleh kepala desa.

B. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan hanya mampu dijalankan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai keterampilan kepemimpinan. Terlepas dari hal itu pemimpin juga dapat mempengaruhi posisi/pendapat seseorang atau sekelompok orang, orang yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang dapat membuat rencana yang strategis, kerja sama, melaksanakan percobaan, dan pemimpin pekerjaan guna memenuhi tujuan bersama. Selain itu, pemimpin dapat menggabungkan semua elemen kekuatan padaseorang pemimpin, serta karakteristik kepribadian dan keterampilan sosial yang dapat memengaruhi perilaku individu lain. Kepemimpinan dilihat juga dari peran kepemimpinannya. Peran Kepmimpinannya dan Fungsi Kepemimpinannya Yakni :

1. Tugas Kepemimpinan

Tugas dari pemimpin yaitu sebagai penggerak, pembimbing dan pengawas pekerjaan dari karyawan di berbagai departemen atau unit kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dapat mencapai hasil yang terbaik guna mencapai tujuan organisasi. Pada buku Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen karya Soewarno Handyaningrat, penjelasan mengenai kepemimpinan merupakan : “Kepemimpinan adalah sebagai suatu proses dimana pimpinan digambarkan memberikan perintah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan

mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan” (Handayaniingrat, 1984 :64).

2. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif hanya dapat dicapai sesuai dengan peran dan fungsi. Peran kepemimpinan berkaitan langsung terhadap kondisi sosial terhadap kehidupan kelompok maupun organisasi manapun, artinya tiap-tiap pemimpin masuk dalam konteks, bukan di luar konteks. Kepemimpinan memiliki fungsi yaitu sebagai fenomena sosial, yaitu kegiatan dilakukan dalam interaksi antar individu yang berlatar belakang sosial suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan yaitu sangat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Pembagian kerja dalam internal organisasi tidak dapat dilakukan secara normal. Pada buku berjudul Teori dan Praktek Kepemimpinan karya Sondang P. Siagian menjelaskan fungsi kepemimpinan yaitu:

1. Pimpinan sebagai penentu kendali untuk mencapai tujuan
2. Pemimpin sebagai garda terdepan dalam berbicara dengan organisasi maupun pihak lain yang bersangkutan.
3. Pemimpin bisa menjadi penggerak komunikasi antar anggota
4. Pemimpin sebagai penghubung yang baik, khususnya dalam hubungan internal, seperti menangani masalah
5. Pemimpin sebagai integrator yang netral, rasional, efektif, dan objektif.

(Siagian, 1999:47

3. Peran Kepemimpinan

Peran kepemimpinan sangat penting dalam organisasi maupun dalam lembaga swasta dan lembaga pemerintah. Dalam organisasi tersebut, keberhasilan organisasi sangat tergantung pada peran kepemimpinan dan pelatihan bawahan sehingga tujuan dan sasaran organisasi/ institusi dapat tercapai. Kepemimpinan bisa di lihat dari beberapa aspek tidak lain dengan adanya dorongan dari individual,

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah prinsip untuk mengatur kinerja dalam organisasi yang terdapat sumber daya manusia beserta elemen yang bersangkutan dengan Pengelolaan, sehingga pengelolaan merupakan prinsip penting untuk kemajuan sebuah organisasi yang di landasi system inventaris yang efektif guna melengkapi kebutuhan organisasi dan megembangkan tujuan organisasi sesuai dengan pencapaiannya. Contoh seperti Bumdes dalam pemerintahan desa yang merupakan garda terdepan dalam perkembangan desa bisa dilihat dari cara pemerintah desa mengelola keuangan/ dana pemerintah daerah untuk pemerintah desa, kemudian dari segi pelayananan serta kebutuhan sumber daya manusia dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat supaya tercapai hasil dan harapan masyarakat. Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695) menyatakan bahwa pengelolaan merupakan mengendalikan, memimpin, mengusahakan dan mengatur agar suatu keadaan dapat stabil serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Dalam artiannya bahwa memimpin sama saja dengan mengelola suatu tujuan yang akan di

realisasikan, dalam masa jabatannya dengan pengelolaannya pemimpin di tegaskan untuk selalu memberikan perencanaan yang baik serta memberikan pertanggung jawaban dalam organisasi yang di bentuk (Depdikbud, 1995/1996: 1-2).

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian pada judul **“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 -2019”** adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode deskripsi keseluruhan berdasarkan kata-kata atau bentuk bahasa, dalam konteks khusus asli dan menggunakan beberapa metode alamiah. Ini Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tantangan dan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan.

D. Pembahasan

1. Perencanaan

Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam praktek perencanaan sangat membutuhkan ketersediaan masyarakat ikut Musrenbangdes yang dibangun dari pengaruh dan gerakan seorang pemimpin yang dinilai menjadi panutan dan cukup mampu dipercaya sebagai pelaksana pemerintahan Desa yang baik. Dari sisi perangkat Desa, Peran kepemimpinan juga perlu hadir dalam menunjang profesionalitas dan soliditas kinerja tim

untuk mencapai tujuan bersama yang dibangun dari manajerial tugas yang tepat.

Dalam proses perencanaan menentukan program 1 tahun yang akan datang kepala desa membentuk tim, tim tersebut di namai dengan tim 7 yang bertugaskan memproses dan menampung segala masukan dan aspirasi masyarakat untuk di angkat dalam musrengbangdesa, di dalam musrengbagdesa tim 7 memaparkan hasil tampungan aspirasi dan masukan dari masyarakat untuk di angkat dan di rapatkan dengan pemerintah desa agar mendapatkan hasil program piroritas dalam 1 tahun anggaran berlangsung.

2. Penganggaran

Kepemimpinana Kepala Desa dalam tahapan Penganggaran merupakan situasi yang cukup membutuhkan kemampuan melihat kecukupan anggaran dalam pembiayaan belanja desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa tidak semua rumusan masalah disepakati menajdi program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa yang didanai dari Dana Desa. Kemampuan pengambilan keputusan seorang pemimpin seperti Kepala Desa Waturoyo dalam menentukan program apa saja yang didanai oleh Dana Desa sangat menjadi pertimbangan serius dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Pelaksanaan

Kepemimpinan Kepala Desa dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa wajib memperhatikan para pelaksana yang terbagi dalam TPK (

Tim Pelaksana Kegiatan) yaitu swadaya dan penyedia. Pembagian tugas dan kewenangan tetap menjadi tantangan kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan yang sudah di sepakati didanai dan disahkan. Penentuan TPK dalam menjalankan prioritas program yang didanai oleh Dana Desa menjadi persoalan yang cukup serius dalam proses keberjalanannya yang perlu mendapatkan tindakan pengawasan dari Pemerintah Desa khususnya kegiatan yang berjangka dan berbentuk fisik seperti pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo sangat dibutuhkan dalam memegang kendali pengawasan yang adil dan tegas apabila ada penyimpangan maupun hambatan yang terjadi dalam lapangan yang membutuhkan tindakan responsif. Kepala desa dalam Pelaksanaan Dana Desa di waturoyo memberikan informasi yang transparan sesuai dengan arahan pemerintah daerah serta berjalannya setiap pelaksanaan pembangunan maka tertulis di papan informasi desa dan jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan dengan Penggunaan ADD 1 tahun anggaran tidak lain dari hal itu pemerintah desa mengedepankan realistik kepada masyarakat sehingga masyarakat sendiri bisa mengetahui anggaran yang sudah di turunkan untuk pengelolaan Dana Desa yang fokusnya pada pembangunan infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan pelaksanaan yang berjalan dalam 1 tahun anggaran.

4. Penatausahaan

Kepemimpinan dalam penata usaha pengelolaan Dana Desa merupakan tahapan yang cenderung bersifat administratif dimana pencatatan keuangan dan pajak menjadi hal yang wajib dipahami dan dikuasai oleh pemerintah Desa. Kepemimpinan Kepala Desa Waturoyo dalam tahapan penata usaha sangat terbantu dengan dan Kaur Keuangan yang memiliki kompetensi dalam menggunakan SISKEUDES. Pemahaman tentang akuntan dan perpajakan dalam ketelitian penata usaha perlu terbentuk dari peran Kepemimpinan Kepala Desa menjaga komunikasi yang efektif dan teliti bersama Kaur Keuangan agar tidak terjadinya maladministrasi dalam penatausahaan. Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa di atur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara taat, tertib, efisiensi, hemat, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan menjaga keadilan dan keselarasan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat, Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam sebuah tatanan pemerintahan Republik Indonesia, maka darim itu Pemerintah desa harus memahami (tupoksi) dalam upaya mengembangkan kinerja pemerintah desa.

5. Pelaporan

Dengan adanya Dana Desa tentu memengaruhi pengelolaan keuangan desa dan berakhir dalam laporan keuangan. Karena desa merupakan salah satu organisasi terkecil dari kesatuan negara yang melayani kepentingan masyarakat, dari bentuk dana yang diterima tentu harus dipertanggungjawabkan, salah satunya bentuk pertanggungjawaban

adalah dengan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang memuat nominal nominal uang yang telah digunakan atau dibelanjakan dan juga jumlah penerimaan yang diterima oleh desa tersebut.

6. Pertanggung jawaban

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik dengan prinsip (Good Governance) yaitu dengan adanya keterbukaan transparansi dan pengelolaan Dana Desa melibatkan berbagai macam Lembaga yang ada di desa seperti Badan Musyawaran Desa (BPD), Perangkat Desa, Masyarakat, PKK, Karang Taruna dan lain-lain dengan adanya melibatkan masyarakat dalam setiap rapat dan keputusan yang di tentukan oleh pemerintah desa agar mengetahui anggaran yang di buat dan di gunakan oleh apa saja dari itu adanya kemudahan oleh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan infrastuktur dan mencegah adanya penyalahgunaan wewenang, namun dengan ini peneliti menemukan bahwa dengan adanya pengelolaan Dana Desa dari pihak kesadaran masyarakat sangat kurang menanggapi perihal pengelolaan desa dan masyarakat sendiri kurang responsif terhadap kepemimpinan kepala desa karena kurangnya pemenuhan sumber daya atau proprgam prioritas yang belum terprioritaskan.

E. Simpulan

Berdasarkan temuan pada wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan dan hasil observasi dalam penelitian tentang kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Waturoyo, maka di dapatkan kesimpulan yaitu Kepemimpinan Kepala Desa dapat ditarik indikator, dalam siklus pengelolaan Dana desa sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dari ke enam indikator memiliki masing-masing poin bahwa Kepala Desa kurang dalam bertpartispasi masyarakat sehingga dalam pengelolaan Dana desa di Desa Waturoyo tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Daswati. 2012. Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi *Jurnal Academica FISIP UNTAD Vol. 4 No. 1*
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods In Social Research*. New York: Mc Graw Hill
- Helmi, Avin F., dan Arisudana, Iman. 2009. Kepemimpinan Transformasional, Kepercayaan, dan Berbagi Pengetahuan dalam Organisasi. *Jurnal Psikologi Vol. 36 No. 2*
- Hughes, Tawney A. 2014. Idealized, Inspirational, and Intellectual Leaders in the Social Sector: Transformational Leadership and the Kravis Prize. *CMC Senior Theses*. Claremont McKenna College
- Junita, Ruhti. 2016. Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014. *JOM FISIP Vol. 3 No. 2*
- Magdalena, Corry., Harmein., dan Nazaruddin. 2016. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel intervening pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa. *Human Falah vol. 3 No. 1*
- Manzilati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat
- Naufan, Fakkur Daffin. 2018. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Padas Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Putra, Chandra k., Pratiwi, ratih N., dan Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Vol. 1 No. 6*

- Rosnani, Titi. 2012. Pengaruh Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Dosen Universitas Tanjungpura. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. No. 1-28*
- Tumbel, Satria M. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Tumulungun Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico Vol. 6 No. 1*